



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU  
**SUB UNIT KERJA** : DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FERRY SYAHMINAN
2. Jabatan : KEPALA SUB DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA  
WILAYAH IV
3. NHK : 638185

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 80.53 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 81.32 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 46.000.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT 150 I-GET ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 90.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 255.580.193**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.451.580.193

**III. HUTANG** Rp. 21.405.996



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.430.174.197

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.